

Peran Modal Sosial Jokowi dalam Politik Kekerabatan: Studi Kasus pada Pilkada 2020 di Surakarta dan Medan

Enkin Asrawijaya¹

Diserahkan: 3 Desember 2022 | Diterima: 18 Maret 2022 | Diterbitkan: 23 Mei 2022

Abstrak

Artikel ini membahas bagaimana modal sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam politik kekerabatan. Politik kekerabatan yang terjadi pada Pilkada 2020 melibatkan keluarga Jokowi, yaitu Gibran di Surakarta dan Bobby di Medan. Tulisan ini penting untuk dibahas karena topik ini memiliki kontribusi pada diskusi akademik. Banyak yang menilai kemenangan mereka karena elektabilitas Joko Widodo yang tinggi sehingga popularitas tokoh tersebut menjadi modal kuat untuk memenangkan persaingan. Hasil penelitian menunjukkan peran modal sosial Jokowi sangat memengaruhi kemenangan Gibran dan Bobby dalam Pilkada 2020. Keduanya bisa dikatakan memanfaatkan kepopuleran nama besar Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Modal sosial atas kepopuleran nama besar keluarga mampu menjadi kekuatan untuk memenangkan kompetisi politik.

Kata Kunci: Keluarga Jokowi; Modal Sosial; Pilkada; Politik Kekerabatan

1 Badan Riset dan Inovasi Nasional. Email: enki001@brin.go.id.

PENDAHULUAN

Tulisan ini fokus pada bagaimana modal sosial yang dimiliki Jokowi mampu memenangkan Pilkada 2020. Modal sosial tersebut mengarah pada politik kekerabatan yang terjadi di keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi), dengan studi kasus Pilkada di Kota Surakarta dan Medan tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun pengetahuan politik kekerabatan kontemporer di Indonesia.

Artikel ini mendeskripsikan bagaimana politik kekerabatan yang dilakukan dalam era Joko Widodo. Fenomena ini menarik untuk dibahas karena ada karakteristik yang unik atau khas dari kasus tersebut, yaitu Gibran dan Bobby yang merupakan putra dan menantu Presiden. Selain itu, pembahasan ini menarik karena perspektif yang digunakan dalam menganalisis berbeda dari cara penulis lainnya dalam mendiskusikan politik kekerabatan.

Praktik politik kekerabatan masa kini melahirkan perbincangan yang menarik dalam arena perpolitikan di Indonesia. Politik kekerabatan dianggap sebagai akibat dari rapuhnya badan kepartaian dan aktualisasi peran dan tugas partai politik. Kondisi ini mengakibatkan tendensi mengokohkan politik kekerabatan yang

kelihatannya menjadi jalur cepat bagi partai politik untuk memuluskan kompetisi politik maupun menjamin keberadaan sebuah rezim politik tertentu (Harjanto, 2011: 138). Konsolidasi politik kekerabatan ini terlihat pada Pilkada tahun 2020. Kasus yang paling menjadi sorotan media dan masyarakat adalah politik kekerabatan yang terjadi di Kota Surakarta dan Medan. Di dua kota tersebut, partai penguasa mengangkat kadernya dari keluarga presiden.

Pada awalnya, kehadiran keluarga Joko Widodo di ajang politik nasional dipercaya dapat memutuskan aliran politik kekerabatan di Indonesia. Tetapi nyatanya, anggota keluarga Jokowi berkeinginan maju dalam Pilkada 2020. Gibran Rakabuming mencalonkan diri sebagai Wali Kota Surakarta dan Bobby Nasution mencalonkan diri sebagai Wali Kota Medan.

Konsep yang dibangun dalam studi ini adalah modal sosial yang dimiliki oleh Jokowi mampu membangun kekuatan bagi putranya dalam pencalonan diri sebagai Kepala Daerah. Menurut Mahendro (2016), kekuasaan melalui jalur pertempuran politik dapat diakses dengan memanfaatkan modal sosial. Selain itu, modal sosial juga merupakan *social support* yang dapat digunakan untuk mempertahankan kekuasaan (Rosaliza, 2016). Keberhasilan kedua putra Jokowi ini

telah memperlihatkan bahwa politik kekerabatan masih terus berjalan.

Peran modal sosial yang penting dalam pesta demokrasi di Indonesia, membuat banyak peneliti mencoba untuk mengkaji fenomena sosial ini. Studi Wisesa (2014) melihat bahwa modal sosial merupakan strategi ampuh untuk bisa memenangkan rivalitas dalam pemilihan Kepala Daerah Lampung Timur. Modal sosial dikembangkan dalam program-program sosial yang mengantarkannya dalam komunikasi politik yang efektif, dan pada akhirnya meningkatkan mobilisasi massa hingga memenangi kontestasi untuk kedua kalinya.

Wahyuni (2019) mengkaji bagaimana pemanfaatan modal sosial oleh Deri Hasta dan Zohirin Sayuti dapat memenangi pemilihan wali kota di Sawah Lunto. Menurutnya, semakin besar akumulasi modal yang dilakukan semakin besar pula kemenangan rivalitas politik yang diikuti. Modal sosial ini berupa pengerahan suara melalui politik kekerabatan dengan memaksimalkan suara, terutama pada komunitas-komunitas yang terafiliasi dengan ikatan keluarga Pariaman dan Tanah Datar. *Hidden political* yang dilakukan dalam tubuh Muhammadiyah, pemerintahan, petani, dan pemuda desa juga efektif meningkatkan

jumlah suara. Selain itu, cara lainnya dengan kegiatan *blusukan*, pembentukan tim sukses dan membuat kelompok pendukung dari golongan perempuan.

Kajian lainnya dilakukan oleh Plaituka *et.al.* (2018) pada fenomena politik pemilu legislatif pasca pindah dapil Kota Surabaya tahun 2014. Hasil penelitiannya menjelaskan Ir. H. Masduki Toha berhasil memanfaatkan modal sosial dalam pemilu legislatif. Jaringan sosial yang dibangun melalui dua jalur, baik formal maupun informal. Aktor berhasil membangun kepercayaan di masyarakat melalui cara bertindak, berbicara, dan berperilaku. Faktor lainnya adalah aktor memiliki organisasi sosial, berwawasan luas, memiliki wibawa, dan karakter dermawan, serta pergaulan yang luas. Kajian ini bisa dikatakan *good personality* menjadi kekuatan yang unggul dalam membangun modal sosial.

Dewi *et.al.* (2018) menganalisis jaringan perempuan dalam politik Pilkada langsung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada awalnya, elite politik perempuan pada Pilkada di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Lampung Timur memerankan modal individu yang kuat (faktor keluarga, finansial, dan kemampuan sosialnya). Modal individu ini mempermudah jalannya untuk memperkuat modal sosial yang dibangun. Caranya melakukan jejaring dengan aktor-aktor kunci,

membangun karir partai, menjalin kerja sama antar aktor, memanfaatkan peluang perempuan dalam kemungkinan jabatan, dan membangun kepercayaan. Ini semua dilakukan dalam waktu yang relatif panjang hingga akhirnya dapat melakukan lobi dan tawar-menawar posisi dalam partai untuk maju pada pertempuran kandidat calon Kepala Daerah.

Wibowo (2014) dalam penelitiannya membawa unsur keunikan tersendiri dalam kontestasi Pemilu legislatif Yogyakarta. Studinya memperlihatkan modal sosial untuk memenangkan pemilihan legislatif bisa melalui kelompok suporter sepak bola. Walaupun secara lembaga, organisasi suporter sepak bola (Brajamusti) tidak secara resmi mendukung calon atas nama Agung Damar Kuswandaru, tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota Brajamusti (suporter PSIM Yogyakarta) memiliki kontribusi memenangkan Agung Damar menjadi dewan legislatif. Kepedulian dan kedekatan Agung Damar Kuswandaru dengan anggota Brajamusti menyebabkan solidaritas muncul diantara suporter dan caleg.

Kajian literatur tersebut memperlihatkan potensi dan kekuatan modal sosial sangat besar dalam arena politik di Indonesia. Faktor modal sosial inilah yang menjadikan dinasti politik berkuasa di Indonesia

menggantikan sistem feodalisme yang berkuasa dengan politik kekerabatan di era imperialisme. Politik dinasti dalam artikel ini didefinisikan sebagai politik kekerabatan. Politik kekerabatan memiliki ruang lingkup keluarga, apakah itu suami, istri, anak, adik, kakak, keponakan, ipar, menantu, dan seterusnya.

Modal sosial dalam dinasti kekuasaan di Indonesia, biasanya memanfaatkan jaringan kekerabatannya. Studi yang dilakukan Putri (2018) membahas tentang jaringan kekerabatan matrilineal yang dimanfaatkan sebagai strategi perolehan suara yang berasal dari jaringan keluarga besar. Namun demikian, jaringan kekerabatan akan menjadi tidak ada artinya jika tidak dapat berinteraksi dengan massa di luar kekerabatannya. Politik yang dinamis membawa aktor harus bisa mengambil kesempatan dan mampu membaca peluang. Salah satunya, peran sosial yang berbasis gender menjadi faktor penentu dukungan dari kaum wanita. Tidak hanya itu, aspek lainnya seperti agama, ekonomi, nilai dan tradisi yang berkembang luas di masyarakat bisa menjadi aset yang sangat berharga untuk membangun modal sosial.

Umumnya, sistem kekerabatan secara patrilineal menjadi jaringan kekerabatan yang mendominasi kekuasaan di Indonesia. Bahkan dari sistem

feodalisme hingga era reformasi, pengaruh kekerabatan patrilineal sangat dominan. Solidaritas kekerabatan melalui jalur patrilineal diidentikkan dengan marga atau nama keluarga besar, misalkan dalam kasus di Sulawesi ada nama keluarga Yasin Limpo, Qahar Muzakar, dan Nurdin Halid (Purwaningsih, 2015).

Sejarah penguasa Indonesia tidak terlepas dari politik kekerabatan, dari mulai keluarga Soekarno hingga Soeharto. Kali ini dalam politik pemilu 2020, muncul rezim baru yang berasal dari orang nomor satu di Indonesia. Politik kekerabatan Joko Widodo menjadi perbincangan hangat seputar Pilkada 2020. Setelah sebelumnya politik kekerabatan Gusdur yang akan mencalonkan Gus Soleh (adik Gusdur sebagai wakil presiden berpasangan dengan Wiranto) gagal menjadi penerus Gusdur dalam politik kepresidenan. Kemudian, Agus Harimurti Yudhoyono yang gagal menembus Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Justru, berbeda dengan politik kekerabatan yang diusung keluarga Joko Widodo dengan mengangkat nama Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution, keduanya berhasil meneruskan tren kekuasaan di Surakarta dan Medan. Banyak kalangan menilai kemenangan keduanya karena elektabilitas Joko Widodo yang tinggi sehingga kepopuleran tokoh menjadi modal yang kuat untuk memenangi kompetisi.

Melihat kajian-kajian modal sosial dalam politik Indonesia tersebut, pembahasannya dalam kerangka kajian politik dewasa ini sangatlah bervariasi. Aspek penting yang diangkat dalam tulisan ini dan belum cukup dieksplorasi oleh penulis-penulis sebelumnya terkait modal sosial dan politik kekerabatan adalah bagaimana jaringan sosial berupa relasi sosial yang dimiliki aktor digunakan untuk memenangkan pertarungan di dalam satu ranah tertentu.

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana politik kekerabatan yang dilakukan keluarga Joko Widodo pada perhelatan Pilkada 2020 menggunakan kerangka analisis teori modal sosial Pierre Bourdieu. Kerangka ini membantu penulis untuk melihat jejaring sosial yang mendasari politik kekerabatan Jokowi dan pengaruh jejaring sosial tersebut dalam kemenangan Gibran dan Bobby dalam Pilkada. Data sekunder sebagai informasi dasar dalam membangun argumen dan pendekatannya adalah kualitatif. Jenis penelitiannya adalah studi pustaka yang menggunakan literatur-literatur sebagai objek utama.

TEORI MODAL SOSIAL PIERRE BOURDIEU

Umumnya, kapital adalah terma yang lazim dimengerti hanya pada arti “kepemilikan ekonomi atau secara material”. Kapital, semata-mata dipahami pada definisi yang terbatas, merujuk pada perihal yang material (seperti uang, komoditi, dan harta benda material lainnya). Bagi Pierre Felix Bourdieu, pandangan tersebut telah mereduksi makna kapital dan akibatnya terbentuk pemahaman yang keliru. Menurutnya, kapital adalah akumulasi seseorang apabila dialokasikan secara pribadi atau kelompok akan menghasilkan suatu kekuatan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Bourdieu mengklasifikasikan kapital dalam empat ragam, yaitu kapital ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik. Kapital ekonomi merupakan kapital yang merujuk pada material, seperti uang, harta benda, dan lain-lain yang dapat diuangkan. Kapital sosial merupakan relasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Kapital budaya merupakan kapital yang memiliki kapasitas untuk ditukar menjadi uang dan prestise, misalkan dalam hal pendidikan. Kapital simbolik merupakan kapital yang tidak berwujud, tidak mudah masuk dalam nalar pengetahuan, tetapi dapat dikonversi menjadi ketiga kapital yang lain.

Dari keempat kapital yang dikonsepsikan oleh Bourdieu, pembahasan terkait politik kekerabatan keluarga Jokowi akan dirumuskan dengan menggunakan modal sosial atau modal sosial. Menurut Bourdieu, modal sosial merupakan keutuhan sumber daya, baik yang nyata maupun tersembunyi dalam suatu dinamika masyarakat. Modal sosial ini dapat dimaknai sebagai hubungan sosial atau kerja sama antara individu atau suatu keluarga dengan masyarakat. Dengan kata lain—melalui modal sosial, individu akan memperoleh dukungan dari masyarakat secara kolektif. Kekuatan modal sosial yang dimiliki seseorang tergantung pada seberapa besar kuantitas maupun kualitas jejaring sosial yang mampu dibangun (Syahra, 2013).

Salah satu aspek penting dalam konsep modal sosial adalah jaringan sosial yang kuat yang mendasari relasi kuasa antara aktor. Aspek ini membantu penulis untuk mendiskusikan bagaimana jaringan politik Jokowi berpengaruh terhadap kemenangan Gibran dan Bobby dalam Pilkada. Bourdieu menjelaskan bahwa kapasitas modal sosial yang dimiliki seseorang tergantung dari kadar jaringan pertalian yang mampu dia kerahkan.

Bourdieu juga membagi modal sosial menjadi dua unsur: *pertama*, relasi sosial yang dapat digunakan oleh seseorang sebagai sumber daya sosial yang

berguna dalam interaksi, dan *kedua*, kualitas dan kuantitas dari sumber daya–sumber daya yang dimiliki. Bagi Bourdieu, modal sosial merupakan aset bagi kelas utama untuk memelihara dan mereproduksi solidaritas dalam masyarakat dan menjaga kedudukan dominan seseorang (Portes, 1998).

MODAL SOSIAL JOKO WIDODO

Kesuksesannya Jokowi di ranah politik karena mempunyai modal sosial. Modal sosial itu bisa dilihat dari jaringan sosial dan politik yang dimiliki oleh Jokowi sebagai seorang politisi. Jaringan sosial dan politik tersebut, di antaranya jaringan dengan partai politik, relawan politik, dan aktivis gerakan sosial, serta pengusaha. Jaringan inilah yang membentuk modal sosial yang dimiliki Jokowi.

Pada tahun 2004, Jokowi bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Dan pada tahun 2005, Jokowi berkesempatan untuk menjadi Wali Kota Solo dengan dukungan dari partainya dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kinerja Jokowi yang bagus dan memuaskan bagi warga Surakarta membuat namanya terpilih kembali menjadi Wali Kota Solo. Nama Jokowi mulai melambung ketika banyak media menceritakan kesuksesan Jokowi di Solo dan

kepribadiannya yang sederhana, jujur, dan santun dalam berpolitik. Bahkan, Jokowi mampu menduduki posisi penting di partai PDI-P.

Elektabilitasnya yang tinggi membuat banyak tokoh-tokoh politik mengusungnya untuk maju dalam persaingan Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Di antaranya, Jusuf Kalla dan Prabowo Subiyanto yang melobi Megawati untuk pencalonan Jokowi maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012.

Belum genap setahun menjadi Gubernur DKI Jakarta, lagi-lagi nama Jokowi memenangkan berbagai survei elektabilitas capres Pilpres 2014 hingga akhirnya Jokowi resmi menjadi calon presiden berpasangan dengan Jusuf Kalla. Namun pada perhelatan Capres, Jokowi harus melawan nama yang sempat mengusungnya menjadi Gubernur DKI Jakarta, Prabowo Subianto. Akhirnya, Jokowi dan Jusuf Kalla berhasil mengalahkan Prabowo-Hatta dalam Pilpres 2014.

Jokowi kembali mencalonkan diri dalam pemilihan presiden berikutnya di tahun 2019 dengan berpasangan tokoh Nahdhatul Ulama, K.H. Ma'ruf Amin. Pencalonan mereka diusung oleh partai PDI-P, Partai Golkar, Partai Nadem, PKB, PPP, Partai Hanura, Partai Perindo,

PKPI, dan PSI. Kesembilan partai ini membentuk koalisi yang diberi nama Koalisi Indonesia Kerja.

Berdasarkan riwayat perjalanan politik Jokowi bisa dilihat bahwa jejaring politik Jokowi sangat meluas. Elektabilitasnya dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga menjadi amunisi efektif memenangkan setiap kompetisi. Bergabungnya Jokowi dengan partai politik mampu mengantarkannya sebagai *leader* di kota Surakarta. Tidak hanya itu, beliau memiliki prestasi sehingga didapatkan kepercayaan masyarakat Solo (lokal) hingga kepercayaan di level nasional.

Kemampuannya mengelola pemerintahan daerah menjadikan dirinya mendapat kepercayaan dari partai politik hingga akhirnya diajukan dalam kontestasi pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Kemenangannya dalam kompetisi Gubernur DKI Jakarta telah menaikkan elektabilitas Joko Widodo. Walhasil, Jokowi dicalonkan sebagai Presiden hingga terpilih mengalahkan Prabowo Subianto. Aktivisme politik yang dilakukannya menyebabkan terpilih dua periode.

Aktivisme politik Jokowi mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Mereka menamakan diri sebagai relawan Jokowi. Relawan-relawan Jokowi membentuk berbagai komunitas, di antaranya Jaman, PIR, BARA JP,

ARPAS (Arek Pasar Simbar) Cluring, Komunitas Milineal Banyuwangi, Komunitas Driver Laros Banyuwangi (KDLB), GPKS Muncar, RAS Darussalam , LMDH Sobo Wono-Bumi Harjo Glenmore, KTH Pandowo Mulyo Desa Sumbermulyo, Jamsey, KTH Tambak Agung, LMDH KTH Sumber Makmur Sejahtera, Petani Perhutanan Sosial, REJO Semut Ireng, dan lainnya.

Hadirnya relawan ini memberi kesan bahwa Jokowi mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat, baik dari level bawah hingga level atas. Fenomena relawan ini memang hadir pada saat Pilkada 2012 DKI Jakarta. Relawan ini mendorong dan mendukung dari mulai pencalonan Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden.

Komunitas-komunitas relawan Jokowi hadir secara mandiri dan tidak bersifat formal. Walau demikian, umumnya komunitas ini memiliki struktur kepengurusan dari tingkat pusat hingga daerah. Keanggotaannya pun beragam ada dari kalangan mahasiswa, advokat, wartawan, hingga pengusaha. Komunitas-komunitas ini memiliki program untuk meningkatkan elektabilitas Jokowi. Begitu juga pendanaannya dilakukan secara swadaya.

Jokowi membawa tren baru dalam aktivitas gerakan sosialnya, yaitu “*blusukan*”. *Blusukan* dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan aspirasi langsung dari masyarakat. Dengan aktivitas *blusukan* ini mampu membangun komunikasi dengan masyarakat bawah sehingga memudahkannya dalam bernegosiasi untuk memecahkan masalah. Berbagai program dibuat oleh Jokowi, seperti Kartu Sehat, Kartu Pintar, Kartu Miskin, dan Program Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) bagi masyarakat yang tidak memiliki Jamkesmas dan Askes, Bantuan Pendidikan Masyarakat Solo, dan program-program lainnya merupakan agenda yang dianggap pro rakyat.

Publik sempat tercengang tatkala Jokowi memperkenalkan proyek mobil ESEMKA. Keberanian Jokowi dalam mengorbitkan produk hasil karya anak bangsa mampu mencuri perhatian publik. Kebijakan ini semakin meningkatkan popularitas nama Jokowi sebagai Wali Kota yang pro rakyat. Jokowi berupaya menjadikan Esemka menjadi mobil nasional yang selama ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia.

Satu kebijakan yang berani adalah ketika Jokowi yang saat itu menjadi Wali Kota Solo berani menentang program Gubernur dalam rencana pembangunan mal di Purwosari. Penentangan Jokowi didasarkan

atas dampak dari pendirian mal tersebut yang akan menggusur dan merugikan para pedagang di lokasi tersebut. Sikap Jokowi tersebut mendapatkan simpati dari banyak masyarakat, terutama masyarakat solo.

Ada beberapa pengusaha besar yang menjadi jejaring politik Joko Widodo. Terutama yang paling fenomenal adalah Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla. Prabowo dan Jusuf Kalla pernah bersama-sama mengusung Jokowi untuk maju dalam perhelatan Gubernur DKI Jakarta, walaupun pada akhirnya Prabowo menjadi pesaing Jokowi yang kala itu berpasangan dengan Jusuf Kalla dalam pencatutan politik Pilpres 2014 dan kembali bersaing dalam perhelatan Pilpres 2019 namun pasangan Jokowi bukan lagi Jusuf Kalla melainkan K.H. Ma'ruf Amin.

Pengusaha lainnya yang menjadi jejaring politik Jokowi adalah Hary Tanoesoedibyo yang semula adalah pendukung Prabowo kemudian berpindah untuk mendukung Jokowi. Sandiaga Uno yang sempat menjadi pesaing Jokowi kemudian merapat dalam barisan Jokowi, seperti yang dilakukan oleh Prabowo. Jejaring politik lainnya dari unsur pengusaha, seperti Erick Tohir, Surya Darma Paloh, Oesman Sapta Odang, Sofyan Wanandi, Rusdi Kirana, Sutrisno Bachir, Jacob Soetoyo, dan masih banyak lainnya.

PENCALONAN GIBRAN

Pengaruh Jokowi menyulap Gibran, bak mahkota pangeran Solo. Kekuasaan birokrasi yang dulu digenggam Jokowi, kali ini akan berlabuh kepada putra sulungnya. Tak ayal, pada awalnya banyak pandangan yang menganggap Gibran tidak cakap mengikuti jejak ayahnya. Hal ini disebabkan karena Gibran tidak memiliki pengalaman berpolitik sebelumnya, dia dengan adiknya lebih fokus sebagai pengusaha.

Keberhasilan Gibran dalam memenangkan Pilkada Surakarta 2020 disebabkan karena beberapa modal sosial. Modal sosial itu yang pertama adalah posisi Gibran yang seorang anak presiden membuat Jokowi mampu memberikan energi modal sosial yang dimiliki untuk mendukung Gibran. Terlebih di kota asalnya yang dulu menjadi karier politik Jokowi hingga ke level wali kota membuat pendukungnya cenderung memilih Gibran sebagai Wali Kota Surakarta.

Melalui kekuatan jejaring sosial Jokowi, Gibran mendapatkan banyak dukungan partai politik. Pengusungan Gibran oleh PDI-P juga disinyalir karena hubungan Jokowi dengan para petinggi partai. Beberapa partai pendukung Gibran, seperti PKB, Gerindra, NasDem, PPP, Golkar, PAN, PSI, dan Perindo.

Berawal dari pengusaha dan didukung dengan elektabilitas Jokowi, kelayalitan warga Solo, dan pengaruh kekuasaan politik sang ayah, Gibran menemukan jalan mulus menuju pencalonannya sebagai Wali Kota Surakarta lewat PDI-P. Terkesan ada praktik nepotisme dalam tubuh PDI-P karena yang dipilih adalah anak dari pembesar PDI-P, yang belum pernah berkecimpung di dalam zona politik.

Situasi tersebut membuat polemik di dalam tubuh PDI-P karena Gibran dianggap menggunakan jalan *by pass* (Ramadhan, 2019). Gibran melakukan pertemuan-pertemuan dengan berbagai tokoh PDI-P, seperti FX Hadi Rudyatmo, Bambang Puryono, hingga Megawati Soekarno Putri. Pencalonannya pun dianggap terlalu dini. Sebab, baru dua bulan bergabung dengan partai PDI-P tetapi bisa mendapatkan restu dari partai untuk melangkah pada gelanggang politik pemilihan wali kota. Kondisi inilah yang menyebabkan silang pendapat intern partai.

Hubungan baik Jokowi dengan tokoh-tokoh sentral PDI-P menjadi jalan ampuh untuk membawa nama Gibran maju sebagai calon kepala daerah. Misalkan saja, FX Hadi Rudyatmo adalah wakil Wali Kota Surakarta ketika Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, walaupun dalam berbagai pemberitaan

hubungan keduanya tidak sedekat dulu dan sering kali FX Hadi mengkritik kebijakan presiden. Namun, hubungan keduanya masih harmonis. Begitu juga hubungan baiknya Jokowi dengan Megawati sebagai Ketua DPP PDI-P menjadi jalan Gibran melenggang mulus pada niatannya berpolitik. Karenanya, dengan mudahnya Gibran mendapatkan lampu hijau dari Ketua DPD PDI-P Surakarta. Jika sudah mendapat restu dari Megawati sebagai DPP partai, maka secara struktural semua partai mengikuti keputusan hingga ke tingkat DPC.

Pendekatan politik yang dilakukan Gibran menjadi penting. *Sowan* atau melakukan pendekatan personal kepada sosok yang dianggap berpengaruh di partai dilakukannya sebagai cara klasik yang masih dipakai. Ada politik tawar-menawar dan lobi di dalamnya sebagai bentuk kedekatan komunikasi dan alat politik untuk mencapai tujuan. Selain itu, ada kekuatan Jokowi yang besar pada rakyat Solo yang sudah dari dulu memiliki kedekatan secara kultural dan politik. Cara pendekatan itulah yang membawa Gibran mampu menegosiasikan visi dan misi politiknya.

Status Gibran sebagai putra pertama presiden menjadi keuntungan tersendiri untuk memopulerkan dirinya. Menurut Simanjutak (2019), tingkat popularitas

Gibran mencapai angka 80%. Popularitas menjadi instrumen penting bagi Gibran untuk memiliki modal sosial yang kuat sebagai kandidat Wali Kota Surakarta.

Pengaruh Jokowi rupanya mampu mendongkrak elektabilitas Gibran. Tidak hanya mendapatkan popularitas saja, dengan naiknya elektabilitas Gibran sebagai bukti bahwa telah dimilikinya kepercayaan dari masyarakat Solo. Ini dibuktikan dari survei Indo Barometer yang menyatakan angka akseptabilitas mencapai 67,5%. Hasil survei juga menjelaskan 23,7 % menolak pencalonan Gibran sebagai wali kota. Penolakan ini terbagi dalam lima kategorisasi, yaitu penolakan atas dasar ketakutan adanya dinasti politik sebesar 28,1 %, menganggap Gibran belum kompeten dan masih banyak yang lebih cakap sebesar 12,3 %, anggapan terlalu muda dan belum berpengalaman sebesar 8,9 %, dan ketakutan akan adanya kontroversi sebesar 6,8 %.

Berikut tabel akseptabilitas Gibran dalam pemilihan calon Wali Kota Surakarta versi Indo Barometer.

Tabel 1. Akseptabilitas Gibran Pilkada Surakarta

<i>Akseptabilitas Gibran</i>		
<i>Penerimaan (Kepercayaan) Masyarakat</i>	<i>67,5 %</i>	
<i>Penolakan Masyarakat</i>	<i>23,7 %</i>	
	<i>Dinasti politik</i>	<i>28,1 %</i>
	<i>Belum Kompeten</i>	<i>12,3 %</i>
	<i>Terlalu Muda</i>	<i>8,9 %</i>
	<i>Kontroversi</i>	<i>6,8 %</i>

Sumber: mediaIndonesia.com

Berdasarkan uraian di atas dan analisis tabel 1 dapat disimpulkan bahwa pengaruh partai (PDI-P) dan nama besar Presiden Jokowi dapat meningkatkan elektabilitas Gibran. Ditambah lagi, Solo memang basis militan PDIP dan Jokowi adalah mantan Wali Kota Solo yang memiliki akar kuat dari modal sosialnya.

PENCALONAN BOBBY

Dinasti politik Jokowi berlanjut hingga ke tanah Batak (Sumatra Utara). Bobby Nasution, menantu dari presiden Jokowi mengikuti jejak kakak iparnya (Gibran) maju dalam pencalonan Wali Kota Medan. Dari sini, terlihat bahwa Jokowi ingin membangun politik paternalistik. Kehadiran keduanya justru menghadirkan kontestasi politik yang berasal dari lingkaran penguasa. Seolah-olah Jokowi sedang membangun penerusnya di dunia perpolitikan. Berbeda dengan Gibran, Bobby mendapatkan kendaraan politiknya dari Golkar. Namun demikian, Bobby mendapat dukungan dari PDI-P, PSI, PAN, NasDem, Hanura, Gerindra, dan PPP. Delapan partai ini melawan dua partai, yaitu Demokrat dan PKS yang menjadi lawan politik Bobby.

Bobby dinilai bagian dari kerangka konsep politik generasi kedua Joko Widodo. Politik kekerabatan dongkrak elektabilitas Bobby dan mampu membawa elemen kolaborasi partai. Momentum ini tidak disia-siakan oleh Bobby maupun partai pengusung. Tentu saja, di dalamnya ada kontrak politik yang terjalin antara Bobby dan partai pengusung. Jika dilihat secara historis, perolehan suara pemilu presiden pada tahun 2014 dan 2019, suara yang dimiliki Jokowi justru

kecil. Inilah yang menjadi tantangan yang berbeda jika dibandingkan dengan kekuatan Gibran yang secara kultural dan politik jelas-jelas berpihak kepada Jokowi. Karena itulah, dinasti Jokowi dalam pemilihan calon Kepala Daerah menggandeng delapan partai besar untuk bisa memenangkan pemilihan Kepala Daerah.

Manuver politik lainnya adalah melakukan kontrak politik dengan lembaga non-partai. UMKM adalah salah satu yang menjadi sasaran kontrak politik Bobby. Bobby melakukan pendekatan intensif dengan para pengusaha UMKM terkait ekonomi lokal. Selain itu, Bobby juga melakukan aksi *blusukan* seperti yang dilakukan Gibran. Aksi *blusukan* ini membawa kontrak politik dalam program edukatif dan atasi kemacetan di Kota Medan (VOI, 2020). Bobby harus lebih bekerja keras daripada Gibran karena di Kota Medan elektabilitas Bobby tidak sama kuat dengan Gibran di Solo. Meskipun Bobby merupakan keluarga presiden, status anak mantu belum memberikan jaminan kemenangan. Apalagi kalau dilihat dari peta kekuatan politik, di Medan (khususnya, Medan Utara) lebih banyak golongan Islam Konservatif yang lebih cenderung anti Jokowi.

Pengaruh presiden bisa dikatakan memberikan sumbangsih bagi kepopuleran Bobby. Pembangunan infrastruktur di pulau Sumatra, khususnya di Medan,

membuat akseptabilitas Bobby menaik. Kepercayaan masyarakat dan adanya jejaring politik yang dibangun menjadi modal sosial yang kuat bagi Bobby untuk lebih percaya diri maju dalam pentas Pilkada. Kota Medan menjadi sejarah baru bagi Bobby yang dulu lebih populer sebagai pengusaha kopi, kini beralih ke politik. Medan menjadi basis awal membangun karier politiknya, dengan didukung Jokowi *effect* menjadi figur kuat dan telah mengakar bagi kejayaan dinasti politik Jokowi.

Citra yang melekat di dalam figur Bobby sebagai bagian dinasti politik Jokowi menjadi hal yang esensial. Memang tidak ada jaminan kemenangan dengan mengandalkan citra politik penguasa. Tetapi, modal sosial yang didapatkan terbesar sebenarnya adalah nama besar keluarga yang didapatkannya, sebab jika bukan menantu presiden mungkin popularitas Bobby tidak tinggi dan bisa jadi tidak ada peluang baginya dalam pencalonan politik.

Pengaruh Jokowi rupanya mampu mendongkrak elektabilitas Bobby. Tidak hanya mendapatkan popularitas saja, dengan naiknya elektabilitas Bobby sebagai bukti bahwa telah dimilikinya kepercayaan dari masyarakat Medan. Ini dibuktikan dari survei Indo Barometer yang menyatakan angka akseptabilitas mencapai 32% ketimbang lawannya yang hanya

mendapatkan angka akseptabilitas 9,8 %, dan sisanya 58,3 % tidak memilih atau pada saat itu belum menentukan pilihan.

Berikut bagan akseptabilitas Bobby dalam pemilihan calon Wali Kota Medan versi Indo Barometer.

Tabel 2. Akseptabilitas Bobby Pilkada Kota Medan

Akseptabilitas Pemilihan Calon Wali Kota Medan Tahun 2020 (7/12/2020)		
Bobby – Rachman	Akhyar – Salman (petahana)	Belum mengambil sikap
32 %	9,8 %	58,3 %

Sumber: mediaIndonesia.com

Berdasarkan tabel 2, Bobby lebih unggul dari petahana. Penyebabnya adalah kepuasan pada petahana yang rendah dan kepuasan kepada Jokowi sebagai Presiden RI yang cukup baik (Erwanti, 2020). Sebenarnya, Bobby kurang diuntungkan dalam politik Kota Medan jika kita mengacu kepada elektabilitas Jokowi, yang berarti didasarkan pada suara PDI Perjuangan yang, ternyata bukanlah partai dominan dalam pemilu legislatif 2014 dan 2019. Bahkan, suara

dari calon gubernur dari PDI-P kalah di Pilkada Gubernur 2013 dan 2018. Begitu juga dengan pemilihan presiden dari PDI-P juga kalah di Pilpres 2014 dan 2019.

KESIMPULAN

Modal sosial Jokowi dibangun berdasarkan Konsep kerja yang dikenal dengan “*blusukan*”. Konsep ini yang menjadikan jaringan sosialnya dengan rakyat kecil menjadi kuat. Prestasi kerja yang dimilikinya juga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepadanya sehingga meningkatkan status sosialnya. Selain itu, modal kepercayaan dari pemangku kepentingan ekonomi juga didapatkan. Modal-modal inilah yang kemudian menjadi senjata yang ampuh untuk memenangkan arena politik.

Relasi sosial yang dibangun oleh Jokowi mampu dimanfaatkan untuk membangun politik kekerabatan, yaitu dengan mengikutsertakan Gibran dan Bobby maju dalam pentas politik lokal. Pada awalnya, banyak pandangan yang menganggap keduanya tidak mumpuni mengikuti jejak Jokowi. Hal ini disebabkan karena mereka tidak memiliki pengalaman dan *trade record* perpolitikan yang cukup. Mereka lebih populer dikenal sebagai pengusaha. Namun didukung dengan elektabilitas, kelayalitan masyarakat pendukung,

dan pengaruh kekuasaan politik Jokowi, itu mampu menemukan jalan mulus menuju pencalonannya sebagai kepala daerah hingga memenangi perhelatan politik lokal.

REFERENSI

- Dewi, K. H., Kusumaningtyas, A. N., Ekawati, E., & Soebhan, S. R. (2018). Modal, Strategi dan Jaringan Perempuan Politisi dalam Kandidasi Pilkada Langsung. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 267–288. <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/765>.
- Erwanti, M. O. (2020). Survei Pilkada Medan Indo Barometer: Bobby-Aulia Unggul, 58,3% Rahasia. *DetikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-5285217/survei-pilkada-medan-indo-barometer-bobby-aulia-unggul-583-rahasia>.
- Harjanto, N. (2011). Analisis CSIS: Politik Kekerabatan di Indonesia. *CSIS*.
- Mahendro, Y. A. (2016). Tindakan Sosial Ekonomi dalam Perspektif New International Sociology. *JISPO*, 6(1), 81–101.
- Plaituka, I. R. R., Azhar, M. A., & Noak, P. A. (2018). Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Pemenangan Calon Anggota Legislatif Pasca Pindah Dapil Pada Pemilu Legislatif Kota Surabaya Tahun 2014. *E-Jurnal Politika*, 1(1), 1–11.
- Portes, A. (1998). *Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology*. Princeton: Princeton University.
- Purwaningsih, T. (2015). Politik Kekerabatan dan Kualitas Kandidat di Sulawesi Selatan. *Jurnal Politik*, 1(1), 97–123. <https://doi.org/10.7454/jp.v1i1.10>.

- Putri, I. A. (2018). Jaringan Kekkerabatan Matrilineal Sebagai Modal Sosial Perempuan Caleg dalam Pemilu 2014. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 19(2), 167. <https://doi.org/10.25077/jaisb.v19.n2.p167-178.2017>.
- Ramadhan. (2019). Keluarga Jokowi-Maruf dan Budaya Politik Kekkerabatan. *Asumsi.Co*. <https://asumsi.co/post/keluarga-jokowi-maruf-dan-budaya-politik-kekkerabatan>.
- Simanjutak, R. A. (2019). Gibran Rakabuming Sudah Punya Modal Sosial Maju di Pilwalkot Solo. *Sindonews.Com*. <https://nasional.sindonews.com/berita/1452040/12/gibran-rakabuming-sudah-punya-modal-sosial-maju-di-pilwalkot-solo>.
- Syahra, R. (2013). Modal sosial: Konsep dan Aplikasi. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 5(1), 1–22. <http://www.jurnalmasayarakatdanbudaya.com/index.php/jmb/article/view/256>.
- VOI. (2020). Tekad Bobby Nasution Jadikan Medan Bersinar. *Voa Indonesia*. <https://voi.id/berita/18978/tekad-bobby-nasution-jadikan-medan-bersinar>.
- Wahyuni, C. (2019). *Penanfaatan Modal Sosial Deri Asta dan Zohirin Sayuti Pada Pilkada Sawahlunto Tahun 2018*. Padang: Universitas Andalas.

- Wibowo, W. (2014). Kontribusi Brajamusti dalam Pemilu Legislatif. *Studi tentang Kontribusi Kelompok Suporter Sepakbola Brajamusti terhadap Pemenangan Anggota DPRD (Agung Damar Kusumandaru) dalam Pemilu Legislatif di Kota Yogyakarta Tahun 2009*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Wisesa, I. G. P. (2014). Modal Sosial, Pemilu Kepala Daerah, Independen 1. *Journal of Politic and Government Studies*, 3(3), 366–375., 012, 1–8.

